

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Melalui penelitian yang berjudul kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap kudeta atas Mohamed Morsi pada tahun 2013, penulis akan berusaha menjelaskan tentang penyebab Amerika Serikat mendukung kudeta tersebut. Mengingat bahwa hegemoni Amerika Serikat sangat kuat dan intervensinya terhadap kawasan Timur Tengah sangat berpengaruh. Perhatian Amerika Serikat terlihat berbeda dalam menanggapi kasus kudeta di Mesir, Amerika Serikat seolah tidak membuat kasus ini sebagai prioritas karena masalah kudeta Mesir ini juga mengakibatkan pelanggaran HAM dan demokrasi. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas demokrasi dan penegakan HAM yang selama ini dijunjung oleh Amerika Serikat.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Amerika Serikat mulai memberikan perhatian cukup serius terhadap kawasan Timur Tengah, seiring dengan beroperasinya perusahaan tambang minyak di kawasan ini antara tahun 1932-1934. Semenjak saat itu dan dilanjutkan pada masa presiden Roosevelt, Amerika Serikat mulai mengemas kegiatan intervensinya dalam bentuk politik luar negeri untuk memperkokoh hegemoninya di kawasan ini. Roosevelt mengadakan negosiasi dengan duta besar Inggris, sehingga pada tanggal 8 Agustus 1944, Inggris dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian untuk saling memanfaatkan hasil minyak bumi Timur Tengah. Paska Perang Dunia II, Amerika Serikat mengambil alih posisi Inggris

sebagai *Super Power* dengan tugas utamanya, yaitu menjaga kepentingan aliansi Barat di kawasan Timur Tengah.<sup>1</sup> Dalam sebuah pidato yang disampaikan pada tanggal 19 Mei 2011, Presiden Obama mengidentifikasi "kepentingan inti" Amerika Serikat berikut di Timur Tengah, yaitu melawan terorisme, menghentikan persebaran senjata nuklir, mengamankan arus perdagangan bebas dan melindungi keamanan wilayah, serta membela keamanan Israel dan mengejar perdamaian Arab-Israel.<sup>2</sup> Kepentingan-kepentingan tersebut berlaku untuk semua negara di Timur Tengah, salah satunya di negara yang memiliki potensi dan posisi yang penting, yaitu Mesir.

Amerika Serikat telah menjalin hubungan diplomatik dengan Mesir pada tahun 1922, paska kemerdekaan Mesir dari Inggris. Hubungan yang dijalin kedua negara berdasarkan pada kepentingan bersama, yaitu dalam proses perdamaian dan stabilitas kawasan Timur Tengah, revitalisasi ekonomi Mesir dan memperkuat hubungan perdagangan, serta promosi keamanan regional.<sup>3</sup>

Selain kepemilikan atas Terusan Suez dan potensi pasar yang besar, Mesir merupakan mitra utama Amerika Serikat dalam berbagi tujuan perdamaian dan stabilitas di seluruh Timur Tengah, Afrika Utara dan sekitarnya. Kedua negara memiliki hubungan militer yang didasarkan pada pandangan bersama bahwa militer Mesir yang kuat dan modern berkontribusi terhadap stabilitas regional. Perjanjian perdamaian Mesir-Israel tahun 1979 telah menjadi fondasi penting bagi

---

<sup>1</sup> Sidik Jatmika, 2014, *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*, Yogyakarta, Maharsa, hal. 135-137.

<sup>2</sup> W. Andrew Terrill, 2013, *After the Arab Spring*, diakses dalam [https://ssi.armywarcollege.edu/pubs/parameters/issues/Summer\\_2013/10\\_Terrill\\_ReviewEssay.pdf](https://ssi.armywarcollege.edu/pubs/parameters/issues/Summer_2013/10_Terrill_ReviewEssay.pdf) pada 4 Mei 2017.

<sup>3</sup> U.S. Department of State Diplomacy in Action, *U.S. Relations With Egypt*, 20 Mei 2014, diakses dalam <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5309.htm> pada 31 Oktober 2016.

semua upaya selanjutnya menuju perdamaian yang lebih luas di Timur Tengah termasuk proses perdamaian Israel-Palestina, hubungan Amerika Serikat juga terkait dengan kerjasama melawan terorisme, operasi penjaga perdamaian di Afrika, memperdalam integrasi ekonomi regional dan usaha bersama lainnya.<sup>4</sup>

Hubungan Amerika Serikat dengan Mesir pada rezim Hosni Mubarak telah berkembang menuju pada persahabatan bilateral yang independen di luar proses perdamaian Timur Tengah. Hosni Mubarak melanjutkan kedekatan kedua negara dari presiden Mesir sebelumnya, yaitu Anwar Sadat. Mesir di bawah Hosni Mubarak memainkan peran pentingnya sebagai negara moderat di kawasan Timur Tengah dan biasanya mengikuti kebijakan Amerika Serikat tentang isu-isu regional. Mesir bergabung dengan Amerika Serikat dalam mendukung Fatah atas Hamas di Palestina. Selain itu, kedua negara juga telah meningkatkan kerjasama ekonomi. Namun, Mesir lamban dalam beradaptasi terhadap reformasi demokrasi dan meningkatnya laporan pelanggaran hak asasi manusia yang membawa kritik dari pejabat Amerika Serikat.<sup>5</sup>

Pada penghujung 2010 hingga 2011, pergolakan politik melanda Timur Tengah yang disebut sebagai “*Arab Spring*” atau disebut juga “*Jasmine Revolution*”. Revolusi ini bertujuan untuk menumbangkan rezim otoriter dan menggantikannya dengan sistem demokrasi. Mesir merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang tidak lepas dari peristiwa *Arab Spring*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Keith Porter, About News, *The US-Egyptian Relationship*, diakses dalam <http://usforeignpolicy.about.com/od/countryprofi3/p/usegyptprofile.htm> pada 31 Oktober 2016.

<sup>6</sup> Azhari Setiawan, *Diplomatic Dilemma dan Standar Ganda Politik Amerika Serikat Terhadap Konflik Sipil-Militer Mesir Tahun 2013*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol.4 Edisi 1/ April 2015, Pusat Studi Masyarakat ASEAN dari Universitas Riau, hal. 67-68.

Revolusi yang diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin sebagai salah satu organisasi transnasional berbasis Islam terbesar saat ini berhasil menumbangkan presiden Hosni Mubarak yang sudah berkuasa selama 30 tahun mundur dari jabatannya.<sup>7</sup> Ketidakpuasan rakyat akan ketidakmampuan pemerintahan presiden Hosni Mubarak dalam mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, serta terbatasnya akses dalam menyampaikan aspirasi melatarbelakangi revolusi yang terjadi di Mesir.<sup>8</sup> Setelah melalui berbagai protes dan demonstrasi, akhirnya perjuangan rakyat Mesir menuai keberhasilan dengan mundurnya Mubarak pada tahun 2011. Pasca jatuhnya Mubarak, pemerintahan sementara Mesir langsung mengadakan pemilihan umum untuk menentukan presiden terpilih. Pemilihan umum Mesir sendiri berjalan dalam dua putaran. Pada putaran pertama, kandidat dari Ikhwanul Muslimin Mohamed Morsi dan Ahmad Syafiq, seorang mantan Menteri di era Mubarak berhasil mengungguli calon-calon lainnya sehingga berhak maju ke putaran kedua. Pada putaran kedua, Muhamed Morsi dari Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) akhirnya mengalahkan Ahmad Syafiq dan berhak menjadi presiden Mesir sah dan demokratis selama lima tahun ke depan.<sup>9</sup>

Berselang sehari dari pengumuman kemenangan Morsi, Amerika Serikat melalui Presiden Barack Obama menyampaikan ucapan selamat kepada Morsi, “Kita berminat bekerja bersama-sama dengan Presiden terpilih Morsi, dengan dasar saling menghormati, untuk memajukan kepentingan bersama antara Mesir

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 68.

<sup>8</sup> Apriadi Tambukara, 2011, *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah*, Yogyakarta, Narasi, hal. 69.

<sup>9</sup> Laksono Hari W, Kompas.com, *Mursi Menangi Pilpres Mesir*, 24 Juni 2012, diakses dalam <http://internasional.kompas.com/read/2012/06/24/2202526/Mursi.Menangi.Pilpres.Mesir> pada 31 Oktober 2016.

dan Amerika”, demikian pernyataan Obama. Pidato Presiden Morsi dalam sidang Majelis Umum PBB pada 26 September 2012 menyatakan bahwa tidak akan merubah politik luar negeri Mesir secara drastis, khususnya terhadap Amerika Serikat, antara lain Morsi tetap memegang teguh perjanjian Camp David yang terjalin antara Israel dan Mesir atas prakarsa Amerika Serikat, selain itu Morsi juga tetap memilih untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan Mesir, juga pinjaman yang dilakukan oleh Morsi terhadap IMF. Keseluruhan paket kebijakan tersebut mengindikasikan bahwa kepemimpinan Mesir di bawah Morsi masih berkeinginan untuk membangun kerjasama yang baik dengan Amerika Serikat, meskipun sebelumnya Morsi adalah kader Ikhwanul Muslimin yang merupakan salah satu gerakan Islam yang dilarang di Mesir. Namun tatkala meraih kekuasaan ternyata realitas-realitas politik yang dihadapi oleh Morsi berhasil melunakkan perilakunya untuk lebih bersahabat dengan Amerika Serikat.<sup>10</sup>

Namun pasca terpilihnya Morsi, stabilitas politik Mesir masih tetap bergejolak. Dalam pergolakan politik tersebut sebagian masyarakat Mesir seperti kelompok Sekular, Liberal, dan Kristen Koptik atau anti-Islam menuntut penggulingan Presiden Morsi, yang dinilai bersikap diskriminatif karena anggota Ikhwanul Muslimin dominan menduduki jabatan di pemerintahan dan Presiden Morsi dinilai tidak memenuhi janji reformasi, perbaikan ekonomi dan politik.<sup>11</sup> Hal tersebut ditandai dengan demonstrasi yang setiap hari terjadi, bentrok antara

---

<sup>10</sup> Scott Paulson, CBS New York, *President Obama Support Egypt's President-elect Mohammed Morsi*, 25 Juni 2012, diakses dalam <http://newyork.cbslocal.com/2012/06/25/president-obama-supports-egypts-president-elect-mohammed-morsi/> pada 23 November 2016.

<sup>11</sup> Al Wa'ie, 29 Juli 2013, *Krisis Mesir: Buah Revolusi yang Gagal*, diakses dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/07/29/krisis-mesir-buah-revolusi-yang-gagal/> pada 8 April 2017.

pendukung dan penentang pemerintah, protes-protes terhadap dekrit presiden, dan pelaksanaan referendum. Pada 22 November 2012, Morsi menerbitkan dekrit tentang kekuasaan baru untuk dirinya sendiri. Namun, Morsi membatalkan dekrit tersebut pada 8 Desember setelah ada penolakan luas. 64% pemilih dalam referendum dua putaran mendukung konstitusi baru tersebut dalam sebuah pemungutan suara yang oposisi katakan telah dicurangi. Namun, Mahkamah Agung Mesir tidak mengesahkan Senat yang didominasi kaum Islamis, yang mengemban sebuah peran legislatif ketika parlemen dibubarkan, dan sebuah panel yang menyusun konstitusi. Hasil tersebut memicu pro dan kontra antara oposisi dan pendukung Morsi.<sup>12</sup>

Sebenarnya dalam hal jabatan, Presiden Morsi telah menawarkan kepada pihak-pihak oposisi (Liberal dan Sekuler) untuk jabatan-jabatan tertentu, namun penawaran tersebut ditolak oleh pihak oposisi. Dalam hal perbaikan ekonomi dan politik, Morsi sebenarnya telah menempuh berbagai cara untuk memperbaiki kondisi dalam negeri Mesir, seperti melakukan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan ekonomi Mesir. Hal tersebut pun terealisasi ketika Mesir berhasil meningkatkan produktifitas gandum, dari sebelumnya hanya memproduksi 20% menjadi 60%, meskipun masih banyak kebijakan-kebijakan Presiden Morsi yang belum semuanya terealisasi. Dalam krisis politik tersebut, pihak militer Mesir sebelum meng kudeta juga memberikan ultimatum Morsi selama 48 jam untuk mengatasi krisis internal di Mesir atau meninggalkan jabatan. Namun, Morsi hingga akhir jabatan menganggap kudeta yang akan dilakukan militer Mesir itu

---

<sup>12</sup> *Azhari Setiawan, Op.Cit.*, hal. 68.

tidak sah. Morsi menganggap legitimasi kepemimpinannya yang sah lewat jalur demokrasi.<sup>13</sup>

Akhirnya pada tanggal 3 Juli 2013, suatu peristiwa mencengangkan terjadi tatkala Presiden Muhammad Morsi yang merupakan presiden pertama yang dipilih melalui pemilu tiba-tiba di kudeta oleh Militer. Kepala angkatan bersenjata Mesir, yaitu Jenderal Abdel Fattah al-Sisi mengumumkan bahwa ia telah melakukan pembekuan konstitusi dan menunjuk pimpinan pengadilan tertinggi Mesir sebagai pemimpin sementara. Terdapat fakta sebelum melakukan kudeta, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi menghubungi Menteri Pertahanan Amerika Serikat, yaitu Chuck Hagel. Laporan pers mengkonfirmasi bahwa al-Sisi berkonsultasi beberapa kali dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat tersebut, sejak awal gerakan protes hingga hari-hari menjelang penggulingan. Polemik politik dalam negeri yang berujung pada campur tangan militer tersebut akhirnya memaksa Morsi untuk turun dari kursi kepresidenannya.<sup>14</sup>

Demokrasi yang hanya berdiri dalam setahun direngut oleh junta militer. Hal tersebut jika dipandang dari berbagai sudut tentu saja merupakan penistaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Lebih parah lagi, implikasi dari kudeta militer ini berakibat pada jatuhnya ribuan korban penembakan oleh militer Mesir terhadap para demonstran pendukung Morsi. Spawforth Hornblower dalam *The Oxford Companion to Classical Civilization* menyatakan bahwa kudeta adalah

---

<sup>13</sup> Kompas, 4 Juli 2013, *Kronologi Kejatuhan Muhammad Mursi*, diakses dalam <http://internasional.kompas.com/read/2013/07/04/1104085/Kronologi.Kejatuhan.Muhamad.Mursi> pada 8 April 2017.

<sup>14</sup> Ben Wedeman and Matt Smith, CNN, *Coup topples Egypt's Morsy; deposed president under 'house arrest'*, 4 Juli 2013, diakses dalam <http://www.cnn.com/2013/07/03/world/meast/egypt-protests/> pada 23 November 2016.

merobohkan legitimasi atau pukulan terhadap negara dengan melakukan tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional berupa “pengambil-alihan kekuasaan”, “penggulingan kekuasaan” sebuah pemerintahan negara dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Samuel P. Huntington merumuskan bahwa terdapat tiga jenis kudeta, salah satunya, yaitu kudeta Sempalan. Kudeta Sempalan dilakukan oleh kelompok bersenjata yang dapat terdiri dari militer atau tentara yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan tradisional saat itu, kemudian melakukan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah tradisional dan kemudian menciptakan elit birokrasi baru.<sup>15</sup>

Berdasarkan dua pendapat ahli mengenai definisi kudeta dan jenis-jenis kudeta, dapat dipahami bahwa apa yang terjadi di Mesir merupakan sebuah kudeta karena Abdel Fattah al-Sisi dengan terang-terangan melakukan perebutan kekuasaan dan merebut legitimasi kekuasaan yang berada ditangan Morsi dengan cara yang inskonstitusional.<sup>16</sup>

Mesir merupakan negara penerima bantuan dana Amerika Serikat terbesar kedua setelah Israel. Tiap tahunnya, Mesir menerima bantuan dana sebesar \$1,5 Miliar. Dukungan Amerika Serikat terhadap Mesir sebelum era Morsi juga ditunjukkan dengan kedekatan hubungan militer diantara kedua negara pada masa Anwar Sadat dan Hosni Mubarak. Di sisi lain dalam hukum Amerika Serikat

---

<sup>15</sup> *Azhari Setiawan, Op.Cit.*, hal. 68.

<sup>16</sup> *Ibid.*



sangat memegang teguh prinsip “*suspending aid to any nation whose elected leader is deposed in a coup*”. Setiap negara yang diberi bantuan oleh Amerika Serikat yang mengalami kudeta terhadap pemimpin yang terpilih secara demokratis, Amerika Serikat akan memberhentikan bantuan pada negara tersebut.<sup>17</sup>

Untuk kasus Mesir, ada yang berbeda ditunjukkan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat melalui Presiden Obama, maupun menteri-menterinya tidak pernah menyatakan bahwa apa yang terjadi di Mesir adalah sebuah kudeta dan pemberian bantuan terhadap Mesir tidak akan diberhentikan. Presiden Barack Obama mengatakan bahwa dia "sangat prihatin" tentang penggulingan Presiden Mohamed Morsi dari kekuasaan. Obama meminta militer Mesir untuk bergerak cepat dan bertanggung jawab mengembalikan wewenang penuh kembali ke pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis sesegera mungkin melalui proses yang inklusif dan transparan. Obama juga mengarahkan departemen dan lembaga terkait untuk meninjau implikasi berdasarkan undang-undang Amerika Serikat atas bantuan mereka kepada Pemerintah Mesir.<sup>18</sup> Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Gedung Putih, Jay Carney dan Menteri Luar Negeri, John Kerry.<sup>19</sup>

Pada Akhirnya pihak Amerika Serikat, melalui juru bicara Departemen Luar Negeri, Jen Psaki menyatakan bahwa Amerika Serikat tetap memberikan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 69.

<sup>18</sup> The White House, 3 Juli 2013, *Statement by President Barack Obama on Egypt*, diakses dalam <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/07/03/statement-president-barack-obama-egypt> pada 4 Mei 2017.

<sup>19</sup> Suara Merdeka, 3 Agustus 2013, *AS Dukung Kudeta di Mesir*, diakses dalam <http://epaper.suaramerdeka.com/read/2013/08/03/08SM03H13NAS.pdf> pada 4 Mei 2017.

bantuan dana tahunan kepada militer Mesir. Amerika Serikat hanya memotong sebagian pendanaan bagi Mesir sebagai bentuk konsekuensi atas peristiwa yang terjadi di Mesir tanpa menyebutnya suatu tindakan kudeta.<sup>20</sup> Selain itu juga Amerika Serikat bahkan telah menjalin kontak kepada Abdel Fattah al-Sisi yang telah terpilih menjadi Presiden Mesir untuk membahas arah kerjasama baru dalam membangun pemerintahan Mesir. Amerika Serikat mengabaikan istilah kudeta, mengabaikan korban-korban jiwa yang berjatuhan di Mesir, dan tetap mendukung pemerintahan baru Mesir yang tidak konstitusional.<sup>21</sup>

Dalam penggulingan Morsi, selain keterlibatan pihak militer dan oposisi terdapat beberapa fakta dari sejumlah pihak seperti dari Program Pelaporan Investigasi di UC Berkeley (*University California of Berkeley*), yang menunjukkan bahwa adanya keterlibatan pihak asing dalam penggulingan Morsi, yaitu Amerika Serikat. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya puluhan dokumen pemerintah federal Amerika Serikat. Dalam puluhan dokumen tersebut menunjukkan, bahwa pihak Washington secara diam-diam juga mendanai tokoh-tokoh oposisi Morsi, seperti polisi dipengasingan, politisi oposisi, dan politisi anti-Islam, yang disalurkan oleh lembaga-lembaga Amerika Serikat di bawah pengawasan Departemen Luar Negeri, seperti melalui *Democracy Human Right and Labour* (DRL), *the Middle East Partnership Initiative* (MEPI), *United States Agency for International Development* (USAID), serta organisasi semi pemerintah, yaitu *National Endowment for Democracy* (NED). NED merupakan penyalur dana utama Amerika Serikat ke Mesir. Kemudian lembaga-lembaga

---

<sup>20</sup> Deutsche Welle, 10 Oktober 2013, *Amerika Bekukan Bantuan Militer ke Mesir*, diakses dalam <http://www.dw.com/id/amerika-bekukan-bantuan-militer-ke-mesir/a-17149001> pada 9 April 2017.

<sup>21</sup> Azhari Setiawan, *Op.Cit.*

tersebut juga menyalurkan dana ke LSM-LSM Amerika Serikat yang lain, seperti *International Republican Institute (IRI)*, *National Democratic Institut (NDI)*, dan *Freedom House*. IRI, NDI, dan *Freedom House* berperan dalam penyebaran demokrasi dan propaganda di Mesir.<sup>22</sup>

Dari latar belakang di atas, dapat dijelaskan bahwa Amerika Serikat telah menunjukkan indikasi terlibat dalam mendukung kudeta yang terjadi di Mesir melalui pernyataan yang telah disampaikan oleh Presiden Obama, Sekretaris Gedung Putih, Menteri Luar Negeri, dan laporan investigasi dari UC Berkeley. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini berupaya untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat mendukung kudeta atas Mohamed Morsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar pada uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengajukan sebuah pertanyaan penelitian berikut: “Mengapa Amerika Serikat mendukung kudeta atas Mohamed Morsi tahun 2013?”

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk memahami suatu permasalahan sekaligus menjawab penelitian di atas, memerlukan adanya kerangka berpikir. Kerangka pemikiran itu terdiri dari teori dan konsep. Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi dan berteori adalah mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan

---

<sup>22</sup> Emad Mekay, 10 Juli 2013, *US bankrolled anti-Morsi activists*, Al Jazeera, diakses dalam <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/07/2013710113522489801.htm> pada 10 April 2017.

mengapa itu terjadi, dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan.<sup>23</sup> Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek atau Fenomena.<sup>24</sup> Kedua hal tersebut yang menjadi acuan dan panduan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini dapat memenuhi prosedur ilmiah. Pada penelitian ini akan menggunakan teori Analisa Konsep Kebijakan Luar Negeri, Konsep Kepentingan Nasional, dan Konsep Geopolitik.

### **1. Konsep Kebijakan Luar Negeri**

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kebijakan luar negeri adalah:

*“A strategy or planned course of action developed by the desicion makers of a state vis a vis other state or international entities aimed at achieving spesific goals defined in terms of national interest.”* (Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.)<sup>25</sup>

Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.<sup>26</sup> Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.

---

<sup>23</sup> Mohtar Mas' oed, 1994, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, hal. 218.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 109.

<sup>25</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, 1969, *The International Relations Dictionary*, USA, Holt, Rinehart and Winston, Inc, hal. 127.

<sup>26</sup> *Mohtar Mas' oed, Op.Cit.*, hal. 184.

Richard Snyder mengajukan suatu prosedur perumusan politik luar negeri yang sifatnya lebih kompleks untuk meneliti proses perumusan politik luar negeri. Richard Snyder dkk mengemukakan bahwa berbagai faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara.<sup>27</sup>

Asumsi dasar perspektif ini, yaitu tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan-keputusan yang dibuat oleh unit-unit politik domestik yang diakui, dimana para pemimpin negara (baik individual maupun berkelompok) bertindak sebagai aktor-aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Perspektif ini memberikan penekanan utamanya pada analisis jaringan birokrasi organisasi yang kompleks dengan prosesur-prosedur kelembagaannya.<sup>28</sup>

Analisis-analisis dalam perspektif ini berhubungan dengan struktur dan proses dari pengambilan keputusan politik luar negeri sampai kepada analisis keputusan-keputusan tertentu, sehingga aktivitas analisisnya berada pada pembukaan “kotak hitam (*black box*) dari perspektif analisis adaptif dan perspektif strategi. Peranan kepemimpinan, persepsi, dan system kepercayaan dari para pembuat keputusan, arus informasi diantara mereka, dan dampak dari berbagai kebijakan luar negeri terhadap pilihan-pilihan mereka merupakan faktor-faktor penting untuk menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara.

---

<sup>27</sup> Yanyan Mochamad Yani, *Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri: Teori Dan Praksis*, Pustaka Ilmiah, 2010, hal. 4, diakses dalam [http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/perspektif\\_perspektif\\_politik\\_luar\\_negeri.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.pdf) pada 1 November 2016.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Penelitian melalui perspektif ini juga hirau akan karakteristik situasional ketika proses pengambilan keputusan sedang berlangsung, misalnya apakah proses pengambilan keputusan dibuat dalam suatu situasi tertekan, krisis, dan beresiko.<sup>29</sup>

Model ini menyatakan bahwa faktor apapun yang menjadi determinan dalam politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan (*decision-makers*). Kelebihan model ini yaitu dimensi manusia dianggap lebih efektif dari proses politik luar negeri itu sendiri. Maka itu faktor-faktor paling penting yang dapat menjelaskan pilihan-pilihan politik luar negeri adalah:<sup>30</sup>

- motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma-norma yang dianut)
- arus informasi diantara mereka (jaringan informasi)
- pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri
- keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan (*occasion for decision*) yang mengacu pada sifat-sifat khusus situasional yang ada pada waktu keputusan itu dibuat, apakah sedang dalam keadaan krisis atau tidak.

Amerika Serikat lebih sering mengambil sikap standar ganda dalam kasus di kawasan Timur Tengah. Seperti pada kasus revolusi Mesir tahun 2011 yang berhasil menjatuhkan rezim Hosni Mubarak yang telah

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 4-5.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 5-6.

berkuasa selama 30 tahun, Amerika Serikat menyambut positif atas dasar proses demokrasi. Namun, hal tersebut tidak tercermin dalam peristiwa kudeta militer yang menimpa Mohamed Morsi pada tahun 2013. Amerika Serikat yang selalu berkampanye tentang demokrasi seakan diam atas kasus pelanggaran HAM dan penggulingan terhadap presiden yang dipilih melalui proses pemilu tersebut. Langkah Amerika Serikat justru tampak lebih mendukung proses kudeta tersebut. Terlihat di sini bahwa kebijakan Amerika Serikat berdasarkan pada situasi yang dihadapi. Jika pemimpin tersebut pro terhadap Amerika Serikat, mereka tidak akan menghiraukan tentang demokrasi tetapi mereka akan menggunakan demokrasi sebagai tameng kepada kubu yang kontra terhadap kebijakan Amerika Serikat. Semua hal tersebut dipengaruhi oleh tujuan kepentingan nasional dari Amerika Serikat itu sendiri.

## **2. Konsep Kepentingan Nasional**

Konsep Kepentingan Nasional adalah konsep yang paling umum digunakan dalam pembahasan politik luar negeri. Konsep ini dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam Politik Internasional.

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional merupakan pilar utama untuk mendukung kebijakan politik luar negeri dan politik internasional suatu negara. Kepentingan nasional suatu negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu semua yang dapat membentuk dan

mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Kekuasaan tidak akan tercapai tanpa adanya kekuatan nasional dan politik suatu negara tidak lepas dari kepentingan nasional, karena tujuan politik luar negeri adalah mencari, mempertahankan, dan memperkuat kepentingan nasional.<sup>31</sup>

Kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah:

*“The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements that constitute the state’s most vital needs.”* (Kepentingan nasional merupakan faktor mendasar dan pokok yang menuntut para pembuat keputusan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional suatu negara merupakan suatu konsepsi yang masih sangat umum dan hasil dari berbagai unsur yang merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsur tersebut menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.)<sup>32</sup>

Untuk mencapai kepentingan nasional perlu adanya strategi tertentu dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Strategi kebijakan luar negeri dirumuskan dengan memperhitungkan berbagai aspek, seperti kekuatan nasional serta peluang dan kendala yang mungkin muncul. Hubungan antar negara harus bersandar pada potensi nyata yang dimiliki dan kondisi dalam negara tersebut.

---

<sup>31</sup> Tulus Warsito, 1998, *Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi, dan Keterbatasannya*, Yogyakarta, Bigraf Publishing, hal. 29.

<sup>32</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *Op.Cit.*, hal. 128.



Dilihat dari segi kepentingan nasional, terdapat empat dasar kepentingan yang melandasi hubungan antar kedua negara atau lebih, yaitu;<sup>33</sup>

- a. Kepentingan Ekonomi (*Economic Interest*), yaitu suatu kepentingan pemerintah didalam meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain.
- b. Kepentingan Tata Internasional (*World Order Interest*), yaitu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya.
- c. Kepentingan Pertahanan (*Military Interest*), yaitu adanya kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain.
- d. Kepentingan Ideologi (*Ideology Interest*), yaitu suatu kepentingan untuk melindungi atau mempertahankan ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

Mencapai dan memenuhi kepentingan nasional merupakan hal yang fundamental bagi Amerika Serikat. Kepentingan ekonomi, kestabilan politik dan keamanan, serta perdamaian di Mesir dan Timur Tengah merupakan kepentingan nasional yang berusaha dicapai oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat merasa khawatir dengan latar belakang Mohamed Morsi yang berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Kelompok islam dinilai dapat mengancam eksistensi Israel sebagai sekutunya, hegemoni,

---

<sup>33</sup> Donald E. Nuechterlein, 1976, *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*, British Journal of International Studies, Vol. 2, No.3, hal. 246-266.

dan stabilitas di kawasan. Hal tersebut juga akan berimbas ke potensi hubungan perekonomian Amerika Serikat dengan Mesir, seperti Terusan Suez, perdagangan senjata, dan perluasan investasi.

#### **D. Hipotesis**

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat mendukung kudeta atas Mohamed Morsi, karena bertujuan untuk menjaga kepentingan strategi politik, yaitu melindungi eksistensi Israel sebagai sekutu Amerika Serikat. Kemudian untuk menjaga kepentingan ekonomi, yaitu mengamankan jalur perdagangan di Terusan Suez, bisnis perdagangan senjata, dan perluasan investasi.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi relevansi pemakaian konsep kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional dalam menjelaskan kasus yang penulis angkat. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen berupa kebijakan luar negeri Amerika Serikat mendukung kudeta atas Morsi, sedangkan variabel independennya meliputi faktor kepentingan Amerika Serikat di Mesir.

##### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *causal explanation*, yaitu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan penyebab dari fenomena

yang diamati.<sup>34</sup> Penulis mencoba menjelaskan tentang penyebab Amerika Serikat mendukung kudeta atas Mohamed Morsi pada tahun 2013.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan, yaitu data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, artikel, jurnal, dokumen, dan bahan dari internet. Data tentang kebijakan politik luar negeri pada penelitian ini didapatkan atau dikutip dari beberapa buku, jurnal, dan internet.<sup>35</sup>

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan telaah pustaka (*library research*), yaitu teknik dengan mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang di bahas. Selain itu juga mengunjungi beberapa situs di internet untuk melengkapi data yang penulis kumpulkan.<sup>36</sup>

## **4. Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam memverifikasi hipotesa yang telah ditetapkan oleh penulis. Penulis akan menggunakan analisis data berupa analisis isi (*content analysis*) dalam penelitian ini, yaitu analisis data yang dilakukan melalui kajian-kajian terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Ulber Silalahi, 2007, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Refika Aditama, hal. 26.

<sup>35</sup> Gumilar Rusliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, Jurnal MAKARA Seri SOSIAL HUMANIORA, Vol. 9, No. 2, 2005, FISIPOL Universitas Indonesia, hal. 58-60.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

## **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut;

1. Mengetahui kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap kudeta di Mesir tahun 2013.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap kudeta di Mesir tahun 2013.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah jangkauan penelitian sangat diperlukan guna membatasi permasalahan yang akan diteliti, sekaligus untuk mempermudah penulisan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan permasalahan yang sudah dipaparkan dalam hipotesis dan latar belakang masalah. Mengingat topik penulisan kali ini sangat luas ruang lingkungannya, maka rentang waktu, geografis, dan lingkup permasalahan dibatasi pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap kudeta di Mesir pada masa kepemimpinan Mohamed Morsi tahun 2013.